

ANALISA

Tahun V NO. 3

MARET 1976

**ASEAN:
PROSPEK DAN
PERMASALAHANNYA
(II)**





Tahun V, No. 3

MARET 1976

ASEAN :
PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA
(II)

seri ANALISA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Phone 56532/35

PENGANTAR PENERBIT

Sebagaimana telah disampaikan dalam edisi no. 2 bulan Pebruari 1976, maka ANALISA kali ini menyampaikan bagian ke-II dari pembahasan mengenai "ASEAN : Prospek dan Permasalahannya". Kali ini dengan menyampaikan tulisan-tulisan J. PANGLAYKIM dan Daoed JOESOEF, dilampiri dengan teks terjemahan bahasa Indonesia dari dua keputusan di dalam KTT-ASEAN yang baru lalu di samping teks lengkap Komunike Pers bersama dalam bahasa Inggris yang dimaksudkan sebagai dokumentasi untuk melengkapi bahan studi pendalaman ASEAN.

Tulisan-tulisan J. PANGLAYKIM maupun Daoed JOESOEF telah disiapkan jauh hari sebelum berlangsungnya KTT-ASEAN dan mendalami permasalahan ekonomi di dalam kerangka kerjasama ASEAN. Tulisan J. PANGLAYKIM berjudul "Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN: Suatu Kemungkinan Bentuk Kerjasama Ekonomi ASEAN" merupakan kertas-kerja pelengkap dalam Seminar mengenai ASEAN yang diselenggarakan oleh Universitas Chulalongkorn di Bangkok bulan Desember 1975. Sedangkan tulisan berjudul "Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya" merupakan pemikiran lebih lanjut ke arah bentuk kerjasama perekonomian ASEAN, karena antara perdagangan dan investasi terdapat suatu hubungan yang sulit untuk dipisah-pisahkan.

Tulisan Daoed JOESOEF berjudul "Renungan Mengenai Masalah Free Trade" membahas masalah Free Trade secara umum dari segi teoritis sebelum meningkat kepada pembahasan secara lebih khusus, yaitu tantangan-tantangan yang sudah ataupun akan dihadapi ASEAN ditinjau dari beberapa pertimbangan, baik pertimbangan ekonomi, sosial-politis, maupun prospektif. Di dalam tulisan ini Daoed JOESOEF mengulas pula perkembangan dari Masyarakat Perdagangan Daerah Pasifik, yang disingkat dengan istilah "MAPERDAP", di mana ASEAN secara langsung terlibat atau berada di tengah-tengahnya. Perkembangan kerjasama ekonomi ASEAN, termasuk perdagangan, tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan wilayah di sekitarnya dan itu adalah perkembangan perekonomian wilayah Pasifik.

Semoga tulisan-tulisan di dalam penerbitan ini ataupun lampiran-lampiran yang diikutsertakan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Dan dengan demikian diharapkan agar permasalahan dan prospek masa depan kerjasama regional ASEAN dapat lebih dipahami secara meluas sehingga usaha memasyarakatkan kerjasama regional ASEAN dapat pula lebih menjadi kenyataan.

Maret 1976

C S I S

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	<i>iii</i>
---------------------------	------------

WILAYAH PERDAGANGAN SELEKTIF ASEAN:

SUATU KEMUNGKINAN BENTUK KERJASAMA EKONOMI ASEAN

J. PANGLAYKIM	1
---------------	---

SUATU PEMIKIRAN BAGAIMANA DAPAT MENILAI IKLIM

INVESTASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN DAN ASIA UMUMNYA

J. PANGLAYKIM	11
---------------	----

RENUNGAN MENGENAI MASALAH FREE TRADE

Daoed JOESOEF	19
---------------	----

Lampiran

I. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia)	37
II. Deklarasi Kerukunan ASEAN (ASEAN Concord Declaration)	44
III. Joint Press Communique, Meeting of ASEAN Heads of Government, Bali, 23 - 24 February 1976	51

WILAYAH PERDAGANGAN SELEKTIF ASEAN: SUATU KEMUNGKINAN BENTUK KERJASAMA EKONOMI ASEAN

J. PANGLAYKIM

PENGANTAR

Pembahasan kertas-kerja ini bersifat sementara karena masih belum semua sumber dapat dipelajari, baik karena faktor waktu maupun kesulitan memperoleh bahan-bahan tersebut. Misalnya belum diketahui apa yang telah dibahas pada pertemuan yang baru saja berakhir di Jakarta. Sebagian terbesar bahan yang ditelaah dalam kertas-kerja ini berasal dari laporan team PBB yang berjudul "Economic Co-operation for ASEAN". Laporan PBB ini tidak banyak diketahui umum karena terbatas pada kalangan pejabat ASEAN dan mungkin sekali memang sangat sulit untuk dilaksanakan. Pembahasan laporan ini cukup teknis dan agaknya dibutuhkan suatu team untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut.

Di sini kita khususnya memusatkan perhatian pada laporan mengenai wilayah perdagangan bebas (free trade area). Sebutan ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian yang dikenal di MEE. Mungkin sebaiknya kita tidak memakai istilah wilayah perdagangan bebas karena biasanya diasosiasikan dengan liberalisasi tarif, dan sebagainya. Kiranya akan lebih tepat dinamakan 'wilayah perdagangan ASEAN'.

I. KEBUTUHAN ASEAN MEMPERTINGGI PRODUKTIVITAS

Salah satu tujuan pokok ASEAN di bidang ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN. Untuk mencapai tujuan ini negara-negara ASEAN baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif harus dapat mempergunakan sumber-sumbernya dengan lebih efektif dan efisien. Tingkat pertumbuhan yang lebih produktif hanya dapat dicapai melalui:

- A. 1. Pooling sumber-sumber sehingga sumber-sumber ASEAN dapat dimanfaatkan lebih baik, dan diharapkan dapat dihindarkan inefisiensi, penghamburan dan usaha-usaha yang overlapping.
2. Memanfaatkan sepenuhnya industri yang ada dan kapasitas-kapasitas lainnya dengan lebih baik dan tepat.
3. Mengusahakan agar mereka memperoleh "access" pada pasar yang sudah siap menampung hasil-hasilnya.
4. Mengatasi pengangguran dan membuka lebih banyak kemungkinan-kemungkinan kerja.
5. Mengalihkan kegiatan dengan produktivitas rendah ke arah produktivitas yang lebih tinggi.

Hal ini membutuhkan suatu sistim ekonomi yang secara otomatis dapat menciptakan tekanan-tekanan yang secara efektif dapat membantu menghilangkan inefisiensi dan penghamburan-penghamburan.

- B. Mengambil manfaat dari keuntungan yang diperoleh karena adanya potensi besar (large scale) dan peningkatan efisiensi yang umumnya ada pada perusahaan besar. Tidak saja terbatas pada bidang manufacturing tetapi juga di bidang-bidang lain seperti pengangkutan, pemasaran, latihan, keuangan. Untuk ini dibutuhkan perencanaan yang tepat dan jitu agar lembaga-lembaga tersebut didukung oleh suatu kebijaksanaan yang tepat untuk menciptakan suatu sistim bisnis yang mampu melaksanakan "mission" tersebut. Ini mengandung implikasi agar sektor swasta dibantu secara sungguh-sungguh.

- C. Mengambil teknologi yang tepat dan sesuai dengan kondisi, seperti adanya suplai bahan-bahan mentah, tingkat ketrampilan, modal ASEAN sehingga dapat diterapkan secara efisien.
- D. Membuka kemungkinan dan kesempatan kepada individu, daerah dan negara di lingkungan ASEAN untuk menspesialisir suatu bidang produksi untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya dengan memperhatikan sumber-sumber alam, ketrampilan, dan sebagainya. Melaksanakan suatu mekanisme yang memungkinkan adanya pertukaran (exchange) antar negara-negara ASEAN dalam rangka pelaksanaan prinsip komplementarisasi relatif.
- E. Ini berarti bahwa negara-negara ASEAN harus dapat mengubah pola perdagangan ekstern dengan memperhitungkan keuntungan komparatif (comparative advantage) dan juga untuk menjamin agar kebutuhan impor yang karena adanya pertumbuhan pesat (antara lain kebutuhan modal akan meningkat) dapat dibiayai oleh hasil-hasil ekspor tradisional dan bentuk-bentuk ekspor yang baru.

Perlu dicatat di sini bahwa kebijaksanaan ekonomi untuk sebagian besar merupakan suatu proses adaptasi secara kontinu karena perkembangan dan perubahan dinamis seperti halnya dengan penambahan penduduk, penemuan-penemuan teknis baru dan sumber-sumber alam, tekanan-tekanan dunia internasional dan sebagainya. Dalam merumuskan kebijaksanaan ASEAN hendaknya memperhatikan dinamika ini.

II. KEHARUSAN INDUSTRIALISASI

Kita mengetahui bahwa dewasa ini kebutuhan impor negara-negara ASEAN sudah melebihi penghasilan yang diperoleh dari ekspor. Menurut laporan pada tahun 1967 kebutuhan akan "finished manufacturing goods" 60% sudah dipenuhi oleh produksi di negara-negara ASEAN, sedangkan angka untuk "manufactured consumers goods" adalah 80%. Mungkin angka-angka tahun 1975 menunjukkan bahwa persentasi yang diproduksi di ASEAN sudah jauh lebih

tinggi, misalnya kebutuhan akan tekstil dalam negeri di Indonesia sudah dapat dipenuhi, demikian halnya dengan Singapura dan seterusnya. Peningkatan hasil-hasil manufacturing dalam negeri mengakibatkan kebutuhan akan "intermediate raw materials" meningkat dan ini pada umumnya masih harus diimpor dari negara industri seperti Jepang. Ini disebabkan karena investasi Jepang dalam bentuk "package deal principle" merupakan suatu cara yang sangat efektif dalam menjadikan ekonomi ASEAN berkembang sebagai suatu "sub-economic-system" pola ekonomi Jepang.

III. BESARNYA PASAR MERUPAKAN FAKTOR PENGHAMBAT PERKEMBANGAN ASEAN

Faktor penghalang pokok adalah keadaan suplai "intermediate products" yang relatif murah dan teratur seperti bahan man-made filament/fibres, dan sebagainya. Memproduksi barang bahan mentah intermediate dibutuhkan modal besar serta produksi dalam ukuran besar pula untuk dapat menjamin efisiensi. Untuk dapat melaksanakan ini maka negara-negara ASEAN hendaknya memperhatikan dan yakin bahwa pertama-tama harus dapat menciptakan pasar yang lebih besar karena tanpa ini tidak dapat bekerja secara efisien berdasarkan kemampuan dan keadaan pasar nasional. Juga harus diintrodukir apa yang dinamakan industri yang didasari ilmu (science based industries) yang merupakan investasi yang mahal dan membutuhkan ketrampilan serta uang dalam jumlah besar. Tujuan ini harus dicapai secara kolektif oleh negara-negara ASEAN karena akan kurang efisien kalau hanya dilaksanakan secara tersendiri oleh masing-masing negara.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBATASI EKSPOR BAHAN-BAHAN MANUFACTURING

Secara kecil-kecilan mungkin beberapa negara ASEAN berhasil mengekspor barang jadi ke negara-negara industri non-ASEAN. Tetapi pasar negara-negara industri sangat kompetitif, adanya dominasi perusahaan

raksasa dan kebijaksanaan seperti restriksi, kuota dan sebagainya untuk barang yang bersifat padat kerja seperti pakaian jadi, tekstil dan sebagainya.

V. KEHARUSAN MEMBENTUK KERJASAMA EKONOMI ASEAN

Menilik faktor-faktor yang diajukan dalam kertas-kerja ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin negara-negara ASEAN secara tersendiri menyelesaikan perkembangan ekonomi secara efisien dan efektif. Perlu dicatat di sini bahwa dalam usaha mencari bentuk kerjasama ekonomi ASEAN, tidak berarti bahwa kerjasama harus semata-mata dimulai di bidang industri, tetapi yang cukup penting dan vital adalah juga kerjasama di bidang-bidang lain seperti perbankan, pengangkutan, pemasaran, dan sebagainya. Khusus masalah perbankan dan pasar uang dan modal belum disinggung secara mendalam.

VI. TEKNIK-TEKNIK KERJASAMA

Beberapa cara/teknik kerjasama yang dapat dipikirkan bersama dalam rangka melaksanakan kerjasama ekonomi ASEAN.

1. Kerjasama dalam menciptakan wilayah perdagangan ASEAN yang selektif dan menselektir barang-barang tertentu yang sudah ada dengan memperhatikan kuantitas, biaya dan sebagainya.
2. Kerjasama dalam bentuk komplementer. Dalam hal ini sebaiknya inisiatif diambil oleh kalangan bisnis, tetapi karena juga menyangkut masalah konsesi, tarif dan sebagainya maka harus tersedia prasarananya yaitu berupa persetujuan masing-masing pemerintahnya.
3. Kerjasama dalam bentuk *package deal* untuk mengalokir proyek-proyek industri besar. Negara-negara ASEAN secara bersama harus setuju bahwa industri tertentu untuk jangka waktu tertentu dikonsentrir di salah satu negara anggota dengan pengertian bahwa mereka saling membantu

dan tidak membeli dari negara-negara non-ASEAN. Inisiatif semacam package deal ini hanya dapat diselenggarakan antar pemerintah.

4. Kerjasama dalam memperbesar usaha sektor jasa-jasa. Ini meliputi kerjasama yang lebih erat dan efektif dalam bidang-bidang perbankan, keuangan, off shore funds, riset, pemasaran, asuransi, pengangkutan, pariwisata, perencanaan ekonomi nasional, dan sebagainya.

VII. WILAYAH PERDAGANGAN ASEAN SELEKTIF

Dari teknik-teknik yang telah diusulkan dalam kertas kerja ini fokus terutama pada pembentukan wilayah perdagangan ASEAN yang bersifat selektif. Usaha ini tidak perlu merugikan salah satu negara jika diselenggarakan dengan persiapan yang lebih matang, hati-hati, selektif dan tepat dalam waktunya (timing). Pendekatan terhadap masalah ini dapat dibagi dalam beberapa fase:

1. *Tujuan jangka panjang*: mula-mula tujuan jangka panjang perlu dirumuskan dan sebagai acuan-ancuan ditentukan kapan tujuan itu ingin dicapai oleh negara-negara ASEAN. Penentuan jangka waktu ini perlu karena pembuatan program kerja dan mengingatkan adanya *sense of urgency* dan *sense of seriousness*.
2. *Komitmen untuk mengadakan negosiasi*: negara-negara ASEAN harus dapat memberikan komitmen untuk mengadakan negosiasi yang teratur dengan suatu program dan jangka waktu di mana secara selektif dibahas penurunan tarif dan pengurangan restriksi terhadap produk dan grup produk yang telah disetujui bersama.
3. *Teknik negosiasi*: diadakan pendekatan bersama secara tekun dan sistematis dan pendekatan item-by-item.
4. *Prosedur negosiasi*: diperlukan prosedur yang teratur, diusahakan untuk mencapai persetujuan prinsip sehingga dapat melaksanakan program kerja jangka panjang secara efisien.

5. *Jenis produk yang mungkin dapat dipilih:* sebagai permulaan dapat di-rundingkan kemungkinan pemilihan produk-produk seperti: tipe tekstil tertentu, barang kimia dan farmasi, barang-barang makanan, semen, sawn-timber dan sebagainya.
6. *Mendistribusikan keuntungan kerjasama ekonomi:* Laporan PBB secara mendalam membahas dan memberikan pedoman pembagian serta distribusi yang adil dalam hubungan dengan keuntungan yang diperoleh sebagai hasil suksesnya wilayah perdagangan ASEAN.

VIII. APAKAH INDONESIA DIRUGIKAN?

Salah satu argumen yang diajukan oleh pihak Indonesia adalah bahwa pembentukan dan persetujuan terhadap ide wilayah perdagangan bebas akan dapat merugikan kita, khususnya menilik tingkat perkembangan industri/manufacturing di Indonesia. Jika kita mengadakan pendekatan secara selektif dan mengambil jangka waktu yang memadai (reasonable), tidak perlu di-kawatirkan akan merugikan industri kita baik secara mikro (individuil) maupun secara makro.

Pertimbangan ini didasarkan atas:

1. Tidak seluruhnya benar pandangan bahwa industri kita tidak dapat bersaing dengan industri-industri di negara ASEAN lainnya seperti Singapura, misalnya kualitas tekstil kita tidak kalah. Selain itu untuk makanan kaleng seperti corned beef, karena bahan mentahnya banyak dan mudah didapat di Indonesia, kita bisa mensuplai ke negara-negara ASEAN lainnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pertama upah buruh kita lebih murah, jumlah dan kapasitas produksi kita jauh lebih besar daripada negara ASEAN. Pasar kita juga sudah lebih besar daripada negara-negara ASEAN lainnya.
2. Hal lain yang perlu diperhatikan secara serius juga bahwa industri kita sering dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang membantu menjadikan mereka lebih kompetitif.

Pertama: aparat birokrasi kita seringkali lebih bersifat mengekang inisiatif industriawan kita dengan berbagai bentuk halangan apakah dalam bentuk peraturan-peraturan, restriksi ataupun tindakan otokratis dan sewenang-wenang.

Kedua: lembaga-lembaga keuangan kita masih belum cukup mampu memenuhi kebutuhan akan berbagai bentuk dan macam kredit yang dibutuhkan oleh industriawan. Untuk investasi kredit modal tersedia, akan tetapi "cost of money" dan jumlah modal kerja mahal dan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Belum lagi jika kita memerlukan modal kerja untuk membiayai distribusi. "Cost of money" di sini jauh lebih tinggi serta jumlah yang tersedia lebih berkurang. Karena itu tidak mengherankan jika industriawan Indonesia meminjam berbagai bentuk kredit dari luar negeri karena "cost of money"-nya lebih rendah. Di dalam negeri "cost of money" rata-rata 24-30%, sedangkan dari luar negeri jauh lebih murah, rata-rata antara 10-15%. Dalam keadaan ini apakah industriawan kita dapat bersaing?

Ketiga: Aspek lain yang kita hadapi adalah ketidakseimbangan yang nyata sekali antara lembaga-lembaga keuangan (perbankan) kita dengan sektor industri. Sektor industri/manufacturing maju dengan pesat tetapi di kalangan lembaga keuangan (perbankan) masih terdapat semacam kecenderungan untuk membuat kebijakan yang ketat (constraint). Pengekangan terhadap perkembangan perbankan swasta sangat terasa terutama dalam masalah penentuan jumlah kredit. Misalnya ditentukan tidak boleh lebih dari sekian bank devisa nasional, dan seterusnya. Pengekangan atas bank-bank swasta nasional akan mengurangi kemampuan bersaing kita dibandingkan dengan perkembangan bank-bank swasta di berbagai negara ASEAN lainnya.

Keempat: bidang lain yang belum kita singgung misalnya jasa-jasa asuransi dan sebagainya. Di sini asuransi asing masih mempunyai kekuatan yang cukup ampuh.

Kelima: Selain itu peranan pemerintah di bidang perbankan, asuransi dan sebagainya dirasakan oleh kalangan industriawan kita mengarah kepada *etatisme*. Walaupun hal ini selalu disangkal, tetapi kalangan bisnis mempunyai cukup fakta yang menggambarkan bahwa nyatanya perusahaan negaralah dominan.

IX. KESIMPULAN SEMENTARA

Dilihat dari sudut ekonomi makro, maka untuk mempertinggi produktivitas agar dapat menghilangkan inefisiensi, penghamburan, dan kegiatan overlapping, kita harus mengadakan semacam "pooling of resources". Pembentukan usaha yang bersifat mengambil keuntungan dari penterapan prinsip berskala besar (large scale) dianjurkan dan kami percaya hal ini sudah dianjurkan pada setiap pertemuan, tapi hanya belum sampai pada taraf pelaksanaan.

Keharusan membangun industrialisasi membawa kita pada aspek impor bahan mentah bersifat intermediate yang tidak saja membutuhkan investasi yang tinggi dan mahal, tetapi juga membutuhkan pasar yang lebih luas sedangkan pasar nasional tidak dapat memberikan keuntungan ekonomis dalam jumlah besar.

Pasar yang lebih luas diperlukan sekali karena keterbatasan pada pasar nasional akan menghambat percepatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ASEAN. Kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dan menghambat pemasaran barang jadi (manufacturing goods).

Semua ini merupakan fakta-fakta yang akan mendorong kita ke arah keharusan untuk mengadakan dan melaksanakan kerjasama ekonomi ASEAN. Kami yakin bahwa aspek-aspek tersebut sudah dibahas oleh para pejabat ASEAN sekalipun baru pada taraf pernyataan, rekomendasi dan belum sampai pada taraf ke arah pelaksanaan.

Kami akan mencoba mengemukakan beberapa kemungkinan pelaksanaan dengan menggunakan beberapa teknik dan cara yang konkrit. Kita mengutamakan kemungkinan pelaksanaan Wilayah Perdagangan ASEAN Selektif. Di sini kita akan menghadapi masalah di dalam negeri sendiri karena ada yang berpendapat bahwa industri dalam negeri kita belum dapat bersaing.

Kami berpendapat bahwa sektor industri Indonesia jika dibina secara selektif dapat bersaing dengan baik terhadap industri ASEAN lainnya. Kemampuan ini akan jauh lebih ampuh jika sarana jasa-jasa seperti perbankan, asuransi, pembatasan dan "etatism", dapat ditangani secara lebih

serius berdasarkan suatu konsep jangka panjang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sebagian besar daya bersaing industri kita ditentukan oleh kebijaksanaan intern yang menurut pendapat kami kurang *conducive*, kurang menunjukkan semangat *ber-"mission"* dan pandangan serba bisnis.

Dengan memperkuat sektor swasta nasional kita dapat menciptakan suatu grup wiraswasta yang dapat bersaing secara ampuh di lingkungan wilayah perdagangan ASEAN dan pada gilirannya wiraswastawan ASEAN yang akan merupakan pimpinan yang ampuh, efektif dan efisien dalam melaksanakan konsep wilayah perdagangan ASEAN. Tanpa wiraswasta ASEAN konsep ini sulit untuk dilaksanakan secara efektif dan riil.

Kerjasama ekonomi ASEAN hanya akan berhasil jika wilayah perdagangan ASEAN merupakan bagian dari rentetan kerjasama yang lain seperti rencana harmonisasi (*harmonization plan*), kerjasama industri dan sebagainya. Wilayah perdagangan ASEAN an sich menurut pengalaman di negara-negara lain seperti LAFTA (*Latin American Free Trading Area*) tidak akan menjamin suksesnya kerjasama regional jika tidak disertai dengan kerjasama komplementaritas seperti integrasi industri, *payment union*, bank pembangunan regional dan sebagainya.

SUATU PEMIKIRAN BAGAIMANA DAPAT MENILAI IKLIM INVESTASI DI NEGARA-NEGARA ASEAN DAN ASIA UMUMNYA

J. PANGLAYKIM

1. ASIA TIDAK HOMOGEN

Benua Asia tidak homogen karena berbagai perbedaan di antara negara-negara di Asia, yaitu perbedaan sejarah, susunan masyarakat, sistem politik, tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi, jumlah penduduk, dan peranan bisnis. Bisnis internasional yang akan bergerak di Asia harus memperhatikan faktor-faktor ini untuk dapat berhasil dalam usahanya. Sejauh pengamatan penulis bisnis internasional cukup realistis dalam mengadakan penilaian mengenai situasi di benua ini, meskipun ada beberapa pihak yang tampaknya masih kurang "informed".¹

2. ASIA SEBAGAI SUATU "GROWTH AREA"

Kecuali Jepang yang sudah merupakan suatu kekuatan ekonomi raksasa, pada umumnya Asia dianggap merupakan suatu "growth area". Potensi yang dimiliki Asia telah menarik berbagai perusahaan internasional yang bonafide, kaum oportunis dan petualang untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Peristiwa yang masih segar dalam ingatan kita adalah pembentukan "giant paper enterprises" oleh beberapa petualang dalam bidang keuangan yang berhasil menarik uang dari publik melalui berbagai cara dan manipulasi,

¹Lihat kumpulan karangan Robert O. Tilman, Man, State and Society in Contemporary South East Asia, London, Pall Mall Press, 1969.

misalnya peristiwa Haw Par Brothers di mana Stater Walker dan kawan-kawannya mengambil peranan dan peristiwa terakhir yang dialami oleh Mosbert Group.

Asia sebagai "growth area" terutama dilihat dari segi potensi konsumen. Kalau di negara-negara industri konsumen sudah mencapai kejenuhan, sebaliknya pola dan jumlah konsumsi di Asia masih jauh daripada jenuh. Di negara-negara Barat konsumen adalah sekaligus akselerator dan merupakan salah satu "engine of growth" yang penting. Dewasa ini para konsumen di Eropa, Amerika dan di Jepang sudah memiliki lebih dari satu mobil, t.v., rumah, radio, dan sebagainya sehingga para produsen dihadapkan pada suatu pola konsumsi yang hanya dapat ditingkatkan melalui "hard pressed selling". Inipun tampaknya sudah mencapai tingkat kejenuhan. Di Asia jika tingkat pembelian para konsumen pada suatu saat meningkat hal ini berarti bahwa di Asiapun konsumen akan menjadi salah satu "engine of growth". Pada saat hal ini terjadi, usaha seperti manufacturing, bank, lembaga keuangan dan jasa-jasa lainnya akan dapat ikut menikmati perkembangan tersebut.

3. IKLIM INVESTASI DAN CARA MENILAINYA : SUATU PANDANGAN

Iklim investasi di negara Asia berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Perbedaan ini dapat dilihat dari sejarah, politik, ekonomi, struktur dan masalah-masalah berusaha (operating problems). Bisnis internasional yang hendak dan sudah berusaha di beberapa negara di Asia sudah memaklumi adanya perbedaan-perbedaan iklim investasi ini.

Pada suatu saat negara-negara di Asia bersaing untuk menarik para investor masuk ke masing-masing negaranya sehingga para investor dapat menarik keuntungan dari persaingan ini. Akan tetapi akhir-akhir ini khususnya negara-negara ASEAN sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan dan sudah dibentuk panitia untuk dapat menciptakan suatu pola dan kebijaksanaan investasi langsung untuk memberikan suatu package kepada para investor yang mungkin lebih menarik daripada saling bersaing.

a. Perspektif sejarah

Kebanyakan negara-negara Asia adalah bekas jajahan dan perekonomian nasional biasanya lebih diarahkan untuk kepentingan para penjajahnya. Kecuali Muangthai yang tidak pernah mengalami penjajahan, negara-negara ASEAN lainnya merupakan sumber bahan pertanian dan bahan-bahan mentah lainnya. Kalau sampai saat ini perdagangan di negara-negara ASEAN belum demikian berkembang antara lain disebabkan oleh akibat kebijaksanaan ekonomi penjajah-penjajahnya. Kecuali Singapura, sebagian besar perekonomian negara-negara ASEAN didasarkan atas pertanian. Dalam pembahasan ini penulis membatasi diri pada negara-negara ASEAN dan hanya menyinggung Asia pada umumnya dalam hubungan-hubungan tertentu. Secara sosial masyarakat Asia adalah suatu "plural society".¹

b. Aspek-aspek politis

Kestabilan, orientasi dan tata politik merupakan aspek-aspek yang harus diperhitungkan oleh bisnis internasional dalam menilai iklim investasi. Dalam hubungan ini sebaiknya kita tinjau orientasi negara-negara ASEAN, karena merupakan salah satu elemen penting dalam menilai aspek-aspek politis,

i. Berdasarkan orientasi nasional dalam kaitannya dalam pengambilan keputusan negara-negara di Asia dibagi atas:

- Yang berorientasi ideologis: Vietnam, Laos, Birma, Srilangka, Kamboja, RRC.
- Yang berorientasi program: negara-negara ASEAN
- Yang berorientasi bisnis: Jepang, Hong Kong termasuk Singapura.

¹ Alvin Rabushka dan Kenneth A. Shepsle, dalam bukunya Politics in Plural Societies, A Theory of Democratic Instabilities, Charles E. Merrill Publishing, 1969, "... a society is plural if it is culturally diverse and if its culture sections are organized into cohesive sections. The identification of a plural society, then, becomes a matter of observation. Politically organized cultural sections, communally based political parties, the partitioning of major social groups (e.g. labour unions) into culturally homogeneous subgroups, and political appeals emphasizing primordial sentiments serve as unambiguous indicators of a plural society".

- ii. ASEAN yang berorientasi program tidak saja hendak menciptakan suatu kerjasama yang lebih erat melalui proses perundingan, kebijaksanaan dan proyek-proyek bersama tetapi juga bertujuan menciptakan suatu kondisi untuk meningkatkan ketahanan nasional sebagai syarat pokok menuju kestabilan politik. Kestabilan politik pada tingkat nasional akan merupakan dasar dan jaminan ke arah kestabilan politik regional.
- iii. Dalam penilaian politis para penilai harus memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan dan masalah waktu (timing). Proses pengambilan keputusan berhubungan erat dengan susunan kekuasaan dan kaitan-kaitannya antara perorangan dan kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya di beberapa negara ASEAN tertentu, jangan dilupakan "informal groupings" yang harus juga diperhitungkan dalam susunan kekuasaan dan proses pengambilan keputusan.

c. Aspek-aspek ekonomis

Aspek-aspek seperti ketidak-lancaran perekonomian, kekurangan devisa untuk pembiayaan impor, pembayaran jasa-jasa, ongkos-ongkos yang tinggi dalam perkembangan suatu usaha, kemungkinan adanya devaluasi, tingkat perkembangan atau pertumbuhan dan ekonomi tingkat teknologi turut menentukan usaha mempertinggi kestabilan dan ketahanan di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN pada umumnya belum memperlihatkan perkembangan ekonomi pada taraf yang sama. Negara-negara ASEAN (kecuali Singapura) adalah produsen-produsen bahan mentah dan bahan-bahan industri. Singapura berusaha memperkembangkan diri sebagai pusat keuangan di Asia Tenggara dan telah berhasil menciptakan sarana-sarananya.

Yang penting bagi negara-negara ASEAN adalah komitmen negara-negara ASEAN sendiri untuk menciptakan suatu kerjasama regional yang dapat mempertinggi kapabilitas dan kapasitas nasional dan regional. Sebelum KTT ASEAN di Bali kerjasama ini belum tegas tetapi mulai terarah setelah Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi di Kuala Lumpur pada bulan Maret 1976 di mana disetujui untuk mengadakan feasibility studies proyek-proyek yang bersifat regional. Salah satu aspek yang dewasa ini belum memperoleh perhatian adalah mengadakan kaitan (link) antara sektor makro dan sektor mikro.

Salah satu akibat adalah adanya perbedaan besar antara kalkulasi harga pokok di antara negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena "equity-debt-ratio" lebih mengarah pada jumlah pinjaman yang lebih besar, yang berarti bahwa dalam kerjasama (joint venture) atau usaha sendiri, modal dari luar perusahaan merupakan komponen yang penting karena usaha itu memerlukan modal yang besar. Pada umumnya modal ini harus dipinjam dari lembaga-lembaga keuangan luar negeri atau perusahaan asing. Perse-tujuan dengan perusahaan atau bank Jepang biasanya dalam bentuk "package deal" dan jumlah bunga yang bersifat "compound" atau "tied up" akan menjadi cukup tinggi. Misalkan bunga resmi 10-12%, tapi dalam rangka "package deal" jika dikaitkan dengan pembelian mesin-mesin, bahan mentah dan sebagainya, pada akhirnya bunga akan mencapai $\pm 50\%$. Demikian juga usaha nasional yang harus meminjam dari luar ASEAN atau Hong Kong. Ke-adaan ini akan sangat merugikan negara-negara ASEAN jika prinsip libera-lisasi perdagangan terus dilaksanakan. Hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara perusahaan nasional dan joint venture yang mempunyai partner bonafide yang mampu memberikan harga pokok yang lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha-usaha nasional yang tidak mempunyai access ke pasar uang internasional. Masalah ini sering kurang disadari kekompleksan-nya padahal sudah masanya diperlukan suatu kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.

d. Aspek struktural

Di sini para penilai mungkin dapat melihat masalah ini dari segi penghasilan negara yang masih sebagian besar diperoleh dari hasil per-tanian, belum adanya sarana yang baik dan kekurangan modal dalam negeri (mungkin ini tidak berlaku untuk Singapura) dan kurangnya tenaga-tenaga terdidik. Dalam rangka ini juga dapat dipelajari kebijaksanaan masing-masing negara dalam menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat struk-tural seperti pengalihan perdagangan transito ke industrialisasi, men-"tackle" proyek yang lebih besar secara regional dan sebagainya. Soal-soal struktural suatu negara sering menimbulkan kesulitan pada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara-negara tersebut kecuali

perusahaan-perusahaan Jepang yang biasanya paling mampu bertahan bahkan mencapai sukses dalam usaha-usahanya. Salah satu kesulitan yang dirasakan adalah kurangnya industri penunjang (supporting industries) meskipun sedikit demi sedikit mulai diatasi dengan adanya berbagai usaha swasta di bidang ini.

e. Masalah operasi (operating problems)

Yang termasuk dalam masalah ini adalah: peraturan yang seringkali berubah; peraturan yang mengatur pemilikan saham perusahaan atau joint venture; adanya industri yang tertutup untuk usaha luar negeri; adanya kemungkinan intervensi terlalu banyak dari instansi-instansi pemerintah; berbagai macam restriksi dan struktur bisnis di negara-negara ASEAN.

Melihat struktur dan organisasi bisnis di negara-negara ASEAN, sebagian besar usaha menengah dan besar (menurut ukuran ASEAN) masih dikuasai oleh kelompok atau keluarga dan belum ada pemisahan yang tegas antara pemilik dan "professional managers". Pengambilan keputusan dilakukan oleh pucuk pimpinan yang sekaligus adalah pemilik. Memang sudah ada beberapa perusahaan besar yang "has gone public", tetapi jika diteliti lebih lanjut sang keluarga masih menduduki posisi yang vital dan tenaga-tenaga profesional hanya diberi kedudukan teknis dengan atribut yang mentereng. Di sini terletak perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan asing yang umumnya memakai tenaga-tenaga profesional. Struktur organisasi bisnis yang belum "public" ini merupakan salah satu masalah operasi (operating problems) yang sangat terasa misalnya di Indonesia, terutama jika pihak asing ingin mempertinggi equity atau mengadakan ekspansi. Situasi di Singapura mungkin agak berbeda di mana DBS ikut membantu mencari modal untuk equity.

Bisnis di Asia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok:

- i. Negara-negara dengan struktur bisnis yang sudah berkembang: Jepang, Hong Kong.

- ii. Negara-negara Asia dengan struktur bisnis yang masih berada dalam masa transisi dari usaha keluarga menjadi "public company"; seperti Singapura, Filipina, Malaysia dan Taiwan (di sini sektor pemerintah juga kuat)
- iii. Negara-negara Asia dengan struktur bisnis yang sebagian besar masih berada di tangan keluarga serta sektor perusahaan negara cukup kuat, misalnya Indonesia, Malaysia, Muangthai (mungkin lebih banyak perusahaan keluarga dan pejabat), India dan Korea Selatan
- iv. Negara-negara di mana sektor pemerintah merupakan sektor utama seperti India dan Birma.

4. SUATU IKHTISAR

Bisnis internasional yang yakin bahwa Asia/ASEAN (kecuali Jepang) "growth area" mempunyai potensi konsumen dan pasar selalu harus mengadakan penilaian tentang iklim investasi walaupun negara-negara yang bersangkutan berusaha menarik mereka dengan berbagai insentif. Berbagai aspek yang termasuk dalam penilaian adalah sejarah, politik, ekonomi, struktur dan masalah operasi.

Kestabilan politik, ekonomi dan sosial disertai dengan adanya usaha-usaha menghilangkan hambatan-hambatan struktural dan mengatasi kesulitan yang bersifat operasionil merupakan pokok inti tiap penilaian bisnis internasional yang kemudian bersifat konseptual. Di sini kita hendak menekankan bahwa semua aspek yang dipandang penting oleh bisnis internasional sudah tercakup dalam dasar pemikiran negara-negara ASEAN, yaitu mempertinggi ketahanan nasional di mana elemen-elemen seperti kestabilan politik, ekonomi, menghilangkan secara bersama atau nasional hambatan-hambatan struktural, serta mengatasi kesulitan-kesulitan operasionil merupakan prioritas utama dalam program setiap pemerintah. Orientasi pada program di negara ASEAN merupakan suatu jaminan bagi bisnis

internasional bahwa kawasan ASEAN akan merupakan suatu "growth area" yang segera akan menjadi kenyataan. Secara jangka pendek memang masih banyak hal-hal yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN, tetapi secara jangka panjang jika negara-negara ASEAN sudah mencapai momentumnya maka akan bergerak sangat cepat dibandingkan dengan negara-negara lain.

RENUNGAN MENGENAI MASALAH FREE TRADE

Daoed JOESOEFF

PENDAHULUAN

Tulisan berikut ini merupakan renungan analitis mengenai masalah Free Trade. Ia disajikan di dalam dua bagian pokok. Bagian pertama memuat pandangan umum (teoritis) mengenai Free Trade dan yang kedua mengandung pembahasan Free Trade di dalam rangka ASEAN.

I. PANDANGAN UMUM TENTANG FREE TRADE

1. Pengertian Umum

(i) Free Trade

Dengan sebutan "free trade" pada umumnya diartikan sebagai politik perdagangan internasional yang menentang dikenakan bea (tariff) atas barang-barang untuk keperluan yang lain daripada guna pengisi kas negara. Di dalam rangka politik free trade, tidak dikenal diskriminasi, baik terhadap barang maupun terhadap negara melalui pungutan bea ataupun pembatasan impor. Dengan diskriminasi terhadap "barang" dimaksudkan perlakuan (treatment) yang berbeda terhadap barang yang sama (identik) antara yang diproduksi di dalam negeri dengan yang didatangkan dari luar negeri. Misalnya radio impor dari luar negeri dikenakan bea masuk yang jauh lebih

tinggi dari semestinya demi melindungi radio yang sama tetapi dihasilkan di dalam negeri. Dengan diskriminasi terhadap "negara" dimaksudkan perlakuan yang berbeda terhadap semua barang yang diproduksi oleh suatu negara tertentu. Misalnya, semua barang yang diproduksi oleh satu negara tertentu, walaupun dibolehkan masuk, dikenakan bea yang jauh lebih tinggi dari barang-barang sama yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Dengan perkataan lain, politik free trade tidak menentang segala jenis bea, cukai, dan pungutan yang ditarik guna mengisi kas negara semata-mata. Yang ditentang adalah segala jenis tindakan dan pengaturan perlindungan (measures of protectionism) di dalam bentuk bea (tariff), kuota ataupun pembatasan impor secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya azas free trade menghendaki adanya konvertibilitas di antara semua uang nasional.

(ii) Free Port

Dengan "free port" mungkin diartikan sebagai suatu area perdagangan bebas dalam bentuk satu kota maritim sebagai keseluruhan (free trade port), mungkin juga sebagai satu zone di sesuatu kota pelabuhan (free zone), ataupun satu area di suatu kota perdagangan (foreign trade zone), ataupun satu daerah industri khusus di mana berlaku ketentuan dan fasilitas perdagangan bebas, jadi gabungan antara "free trade zone" dan "industrial park", dan disebut sebagai "export processing zone" atau "free export zone". Dalam arti apapun ia ditanggapi, intinya adalah bahwa barang-barang bebas masuk ke dalam "free port" dan disimpan di situ tanpa keharusan membayar sesuatu bea seperti yang lazimnya ditarik atas barang yang sama di daerah yang bukan free port. Selanjutnya barang-barang tersebut boleh dibungkus kembali (repacked), ataupun diubah menjadi satu produk baru yang lain sifat dan bentuknya dari yang semula melalui proses industri dan kemudian dire-eksport. Dalam hal ini bea hanya ditarik bila barang yang bersangkutan, baik dalam bentuknya yang asli, bungkus baru ataupun bentuk lain, dibawa ke luar dari "free zone"

masuk ke daerah sekitarnya (hinterland). Free ports yang penting yang pernah ada di Asia adalah Hong Kong, Macao dan Singapura (sewaktu masih koloni Inggris) sedangkan "export processing zone" yang kini sedang dikembangkan secara sistematis terdapat di Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Singapura dan Malaysia.

2. Pengecualian di dalam Free Trade

Walaupun free trade menentang segala jenis pengaturan diskriminatif dalam bentuk bea, cukai dan pungutan serta pengawasan devisa baik secara langsung (sistem penjatahan) maupun tidak langsung (kurs berganda), ia masih membenarkan beberapa pengecualian. Artinya, ia membenarkan diadakannya bea, cukai ataupun pungutan khusus, yang ditujukan pada dasarnya bukan untuk mengisi kas negara tetapi untuk tindakan diskriminatif, ataupun untuk keperluan itu mengadakan pembatasan impor, sistem penjatahan dan kurs khusus untuk devisa tertentu, selama tindakan-tindakan itu jelas ditentukan jangka waktu penterapannya dan demi pertimbangan-pertimbangan berikut:

(i) Guna melindungi industri baru.

Setiap masyarakat berhak dan wajar untuk membangun industri nasionalnya sendiri. Namun demi pertumbuhannya yang cepat dan sehat, industri ini memerlukan perlindungan dari negara selama periode permulaan pertumbuhannya terhadap segala bentuk saingan dari industri asing berhubung secara normal memang diakui bahwa setiap industri muda, tanpa persaingan dari luar, sudah harus menghadapi begitu banyak macam persoalan yang harus diatasinya. Azas pemberian perlindungan terhadap industri muda ini seringkali disebut sebagai "infant industry principle".

(ii) Guna melindungi pemupukan modal nasional dan memungkinkan pengembangan keahlian teknis-produktif penduduk.

- (iii) Guna melindungi sektor tertentu berhubung sektor yang bersangkutan merupakan sumber lapangan kerja (employment) yang terbesar.
- (iv) Guna menjaga supaya sumber alam tertentu tidak segera habis.
- (v) Demi pertimbangan-pertimbangan sosial-politik seperti perlunya penganeka-ragaman industri (diversified industry), perlunya mempertahankan tingkat upah yang tinggi, dan perlunya memperhatikan kepentingan pertahanan nasional ataupun mempertahankan kebebasan strategis di dalam sistem pertahanan nasional.

3. Manfaat dan kerugian dari free trade

(i) Manfaat Pokok

Bila diadakan free trade di antara bangsa-bangsa, setiap bangsa dapat mengkhususkan diri di dalam pembuatan barang-barang di mana dia berada di dalam kedudukan yang termaju dan terbaik serta ongkos yang termurah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dalam memproduksi barang yang sama. Jadi hasil yang ideal dari free trade ialah bahwa setiap bangsa dapat membeli dengan murah barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dipunyainya sebagai imbalan terhadap barang dan jasa yang paling cocok bila diproduksi sendiri. Dengan begitu setiap negeri berkesempatan menggunakan seefisien mungkin semua potensi kekuatan industrinya dengan jalan meninggalkan ataupun mengurangi cabang-cabang produksi di mana ia sendiri berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Pengusaha pabrik, pada khususnya, dapat menarik manfaat yang terbesar dari pemusatan usaha di dalam kondisi yang paling menguntungkan. Perbaikan organisasi di dalam sistem produksi besar-besaran biasanya menaikkan output dan mengurangi ongkos per unit produksi. Pertanian dan pertambangan juga dapat menarik manfaat yang besar berhubung penyusutan

komponen alamiah sebagai akibat kenaikan permintaan yang dimungkinkan oleh perluasan pasaran melalui free trade, dapat mendorong pembukaan atau eksploitasi daerah/sumber baru dan adopsi metode kerja yang paling efisien.

(ii) Kerugian Pokok

Bila demi pertimbangan manfaat komparatif ataupun ongkos komparatif sesuatu negeri mengkhususkan diri di dalam menghasilkan bahan mentah dan bahan baku dengan sistem produksi yang berteknologi rendah dan (biasanya) padat kerja, maka manfaat yang diperolehnya hanyalah bersifat jangka pendek. Di dalam jangka panjang ia akan mengalami kerugian. Tidak saja sistem produksi seperti itu hanya memberikan tambahan-nilai (value added) yang rendah sekali terhadap sumber alamnya, tetapi yang paling serius adalah bahwa sistem seperti itu tidak mendorongnya untuk memperkembangkan tingkat teknologi. Demikian rupa sehingga lama kelamaan negeri ini akan mengalami ketinggalan teknologi yang semakin besar dari negeri-negeri lainnya dengan segala macam akibat buruk yang harus dideritanya kelak di bidang perkembangan ekonomi, sosial dan ketrampilan teknis penduduknya.

II. FREE TRADE DALAM RANGKA ASEAN

1. Dasar Pemikiran

Secara resmi dan terbuka gagasan ini dicetuskan di dalam pernyataan bersama antara PM Kukrit Pramoj dan Presiden Marcos di Manila, ketika yang pertama disebut itu mengunjungi Pilipina tahun yang lalu. Dikatakan di situ bahwa free trade dimaksudkan sebagai langkah pertama ke arah tujuan yang lebih luas, yaitu integrasi ekonomi regional ASEAN.

Pikiran pokok yang mendasari pernyataan resmi itu adalah bahwa di dalam usaha mempercepat modernisasi ekonomi nasionalnya masing-masing, negeri-negeri ASEAN mungkin sekali mengalami resiko duplikasi berlebih-lebihan di bidang industri dasar, di bidang pertanian dan di dalam usaha mencari pasaran pada saat di mana diperlukan sekali pencegahan persaingan yang berlebih-lebihan dan penetapan identifikasi bidang-bidang yang komplementer. Dapat dibayangkan betapa semakin lama semakin diperlukan di dalam rangka ASEAN adanya rasionalisasi di bidang investasi dan produksi baja, di bidang produksi mobil, tekstil maupun elektronika. Diperlukan sekali pandangan bersama yang mendalam mengenai program perluasan produksi karet, kopra, kelapa sawit dan bahan pertanian perdagangan lainnya. Hal yang sama juga berlaku mengenai cara pemecahan inflasi, krisis energi dan ketidak-seimbangan di dalam pertumbuhan perdagangan. Untuk usaha bersama ini semua, yang terpenting adalah bahwa harus segera dimulai langkah-langkah permulaan.

2. Pertimbangan Free Trade bagi Indonesia

Di dalam menilai gagasan free trade, menerimanya atau menolaknya, Indonesia seharusnya menimbanginya tidak hanya dari sudut kepentingan nasional tetapi juga regional dan pertimbangan dilakukan tidak hanya dari kacamata ekonomi, tetapi juga politis dan prospektif, sekaligus jangka pendek dan jangka panjang.

(i) Pertimbangan ekonomi

Begitu Indonesia memutuskan untuk menerima azas free trade dan untuk berpartisipasi di situ secara aktif dan setia, hendaknya disadari bahwa mulai pada saat itu secara otomatis ekonomi nasional kita berubah dimensi dan sifatnya. Dimensi ekonomi nasional kita berubah karena skalanya mau tidak mau harus berubah. Free trade berarti melibatkannya dalam pasaran yang

lebih luas karena ia tidak hanya merupakan bagian dari pasaran ekonomi bangsa lain tetapi secara otomatis ia memperluas pasarannya sendiri sampai meliputi ekonomi negeri lain. Perubahan skala pasar mau tidak mau mendorongnya berpikir secara lebih luas, bergerak dalam organisasi yang lebih besar dan karenanya lebih kompleks, bekerja sesuai dengan tuntutan-tuntutan modern dari ekonomi berskala besar. Sifat ekonominya berubah karena otomatis ia bukan lagi merupakan satu ekonomi tertutup, tapi satu ekonomi terbuka yang sanggup bersaing, tidak hanya di pasaran asing tetapi juga di pasarannya sendiri.

Maka bila dilihat dari sudut ekonomi, putusan mengenai menerima atau tidak azas free trade tergantung pada dua ukuran pokok, (a) dapatkah ekonomi kita, atau bagian-bagian terpenting dari ekonomi kita bekerja secara skala besar agar dengan demikian dapat menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari perluasan dimensi ekonomi dari nasional menjadi regional. Dengan perkataan lain, sudah adakah sektor-sektor di dalam ekonomi kita yang macet, tidak berkembang lagi, semata-mata karena wadah ekonomi nasional sendiri sudah terlalu "kecil" baginya? Dan (b) sanggupkah ekonomi kita, atau komponen-komponen strategisnya, bersaing dengan ekonomi negeri lain?

Sebagai keseluruhan mungkin tidak ada satupun ekonomi nasional negara ASEAN yang dapat lulus dari kedua ukuran tersebut. Bila demikian maka azas free trade, sebagai permulaan, harus dimulai atau sektor demi sektor atau produk demi produk. Sejauh mengenai ekonomi Indonesia beberapa produk kiranya sudah masanya untuk di-"free trade"-kan demi perkembangannya yang pesat dan sehat. Misalnya tekstil, pupuk, dan semen. Mengenai kedua produk tersebut terakhir, mungkin perluasan skala produksi karena perluasan pasaran melalui free trade ini justru memungkinkan penggunaan maksimum bahan baku yang relatif banyak tersedia di sini, sehingga dengan demikian bahan-bahan tersebut tidak menjadi kurang dimanfaatkan (idle). Dipandang dari sudut ini, hal yang sama kiranya berlaku pula untuk produksi berskala besar bagi hasil pertanian bahan makanan.

Bila ditinjau lebih mendalam, sebenarnya yang dapat lulus terhadap kedua ukuran tersebut di atas tidak hanya produk dari usaha-usaha besar, tetapi juga usaha-usaha menengah bahkan usaha kecil untuk jenis produk tertentu. Misalnya untuk produk yang untuk sebagian terbesar melayani "selera" konsumen, di mana komponen artistik-nya sangat menentukan luas pasaran yang dapat direbut dan dikuasainya, dalam praktek bisnis di negara maju ternyata usaha-usaha kecil yang menghasilkan produk seperti itu tidak hanya dapat, bahkan menang bersaing dengan usaha-usaha besar. Bahkan karena itu, untuk produk-produk yang ber-komponen artistik seperti ini sengaja dibuat supaya penghasil-nya tetap dalam bentuk perusahaan berskala kecil secara organisatoris tetapi berdimensi besar secara satuan produk (hasil). Ke dalam kategori ini dapat digolongkan industri sepatu, perusahaan konfeksi pakaian jadi dan sampai tingkat tertentu hasil-hasil kerajinan tangan. Mengingat kemahiran artistik sebagian besar, walaupun tidak terbesar rakyat Indonesia, maka kiranya produk-produk semacam ini pada waktu ini sudah dapat di-free trade-kan demi perkembangannya. Bila demikian maka hal ini berarti penyebaran pendapatan yang lebih luas di segala lapisan masyarakat kita akibat pertumbuhan kerjasama ASEAN. Sudah tentu di sini ada persoalan pemasaran, tetapi ia adalah masalah pembinaan yang harus digarap oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang relevan.

Dalam rangka pemikiran integrasi ekonomi ASEAN melalui free trade ini, kiranya sudah tiba saatnya pemerintah melakukan sesedikitnya dua hal. Pertama, mentest usaha-usaha industri yang sudah ada, antara lain, berdasarkan kedua ukuran di atas demi penyusunan daftar barang dan produk yang sudah cukup kuat untuk diketengahkan sebagai komponen usaha free trade ASEAN. Kedua, mengkaji secara sungguh-sungguh konsep "export processing zone" (EPZ). Idea yang dikandung oleh konsep ini sebenarnya tidak baru. Ia tidak hanya dikembangkan, bahkan sudah

diterapkan di Eropa dan mulai dilaksanakan di beberapa negara Asia-Pasifik : Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Singapura dan Malaysia.

Dengan perkembangan industrialisasi dalam negeri, semakin dirasa perlu dari waktu ke waktu mengadakan tarif, pembatasan kuota dan pembatasan-pembatasan impor lainnya demi melindungi industri nasional yang masih muda. Namun usaha seperti ini, demi suksesnya tidak perlu meniadakan usaha-usaha lain yang juga cukup penting, yaitu entreport dan perdagangan re-ekspor. Bahkan bila dijalankan secara tepat ternyata kedua usaha tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan sukses melalui konsep EPZ tersebut di atas, sebab memang idee dari konsep ini adalah menggabungkan manfaat yang dapat ditarik dari "free trade zone" dengan manfaat yang ditimbulkan oleh suatu "industrial park". Interaksi antara kedua manfaat itu terbukti dapat membantu memecahkan sekaligus tiga masalah yang pada umumnya dihadapi oleh sesuatu negara terbelakang yang sedang membangun, yaitu kenaikan investasi di sektor industri, penciptaan lapangan-lapangan kerja baru dan pemasukan teknologi baru. Di Filipina, misalnya, pembangunan EPZ dilakukan di dalam tiga tahap. Pada tahap pertama mengenai industri ringan, tahap kedua mengenai industri menengah dan otomatis dan tahap ketiga mengenai industri berat dan pembuatan kapal. Jika di setiap negara ASEAN terdapat EPZ sedangkan integrasi ekonomi regional ini hendak dilakukan melalui sistem free trade, maka sebaiknya pada tahap permulaan sistem ini dimulai pada produk yang dihasilkan oleh EPZ yang terdapat di setiap negara anggota.

(ii) Pertimbangan sosial-politis

Integrasi ekonomi dapat juga memberikan manfaat di bidang politik. Apabila bangsa-bangsa menjadi terlibat di dalam kemakmuran masing-masing, mereka terdorong secara positif untuk bekerjasama dan menjauhi tindakan-tindakan destruktif, seperti

misalnya persaingan tarif, subsidi ekspor atau kebijakan kurs devisa yang dapat menjurus pada lingkaran kebijakan balas dendam yang tak kenal ujung pangkalnya lagi dan akhirnya membuat setiap negara yang terlibat menjadi lebih merana. Apabila masing-masing bangsa sadar bahwa suatu kenaikan di dalam tingkat kemakmuran bangsa lain akan memungkinkan juga kenaikan di dalam kemakmurannya sendiri, melalui perdagangan ataupun investasi, tekad politik (political will) masing-masing untuk saling bekerjasama dapat menjadi semakin mantap. Jadi pertumbuhan kesadaran tentang kepekaan ekonomi yang timbal balik dapat mengakibatkan kenaikan kebutuhan terhadap koordinasi politik yang semakin erat.

Tekad politik yang positif, pada gilirannya, merupakan dasar yang kuat bagi pembinaan sekuriti kolektif. Secara sempit sekuriti dapat diartikan tidak adanya bahaya ataupun ancaman terhadap kelangsungan hidup (survival), tetapi kelangsungan hidup bukan selalu merupakan hal yang dipertaruhkan. Dalam banyak hal manusia ingin aman dan pasti, tidak hanya mengenai kelangsungan hidupnya. Ia ingin juga mempunyai kepastian mengenai kelangsungan penikmatan dan penghayatan nilai-nilai hidup pokok lainnya. Maka itu sekuriti dapat pula diartikan sebagai kepastian bagi orang, atau kelompok orang-orang (masyarakat), untuk membangun, mengembangkan dan menikmati nilai-nilai pokok yang dihayatinya. Secara implisit hal ini berarti bahwa kebutuhan terhadap adanya sekuriti bagi sesuatu kelompok tidak terpenuhi bila, demi menjaga keselamatan badaniah (fisik), ia terpaksa mengganti nilai-nilai pokoknya dengan nilai-nilai lain yang didesakkan oleh pihak ataupun kelompok lainnya. Jadi secara luas kiranya sekuriti dapat diartikan tidak adanya ancaman yang gawat terhadap tingkat minimal nilai-nilai pokok yang dianggap orang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, baik ancaman yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar.

Nilai-nilai pokok yang dihayati orang dapat beraneka ragam. Memang ia tidak tetap, berbeda menurut orang, tempat dan waktu. Namun bila dianalisis secara abstrak terlihat tiga kumpulan pokok nilai-nilai yang dewasa ini oleh kebanyakan orang dianggap esensiil bagi kelangsungan hidup badaniah dan karenanya menjadi obyek yang hendak diamankan oleh sesuatu kebijakan sekuriti nasional. Ketiga kumpulan pokok nilai-nilai itu adalah, (i) satu tingkat minimal kemakmuran ekonomi, (ii) otonomi politik dan sosial tertentu sebagai kelompok, dan (iii) satu tingkat tertentu status politik sebagai kelompok¹. Bila demikian masalah sekuriti bukan semata-mata masalah militer. Masalah sekuriti yang dewasa ini dihadapi oleh setiap bangsa memang mengandung komponen militer, tetapi juga meliputi aspek-aspek politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi. Bahkan dalam banyak hal dimensi ekonomi dari sekuriti terbukti menjadi penting baik sebagai alat potènsiil untuk mengancam nilai-nilai pokok maupun sebagai salah satu dari nilai-nilai pokok itu sendiri yang dapat diancam dari bidang non ekonomi, sesuai dengan ajaran dari "the indirect approach".

Pembinaan sekuriti kolektif, di bidang apapun, kiranya menjadi penting dalam rangka ASEAN. Usaha pembinaan ini mencerminkan keprihatinan kolektif tentang sekuriti regional, sesedikitnya sekuriti bangsa-bangsa yang membentuk ASEAN. Ia berhubungan dengan pandangan moral bahwa manusia, di samping perbedaan, mempunyai keprihatinan yang sama dan dengan kesadaran politik bahwa tidak adanya sekuriti akan menimbulkan berbagai macam konflik yang dapat menyebar luas ke segala penjuru. Bila negara-negara yang mewakili bangsa-bangsa yang membentuk ASEAN bersepakat untuk membina sekuriti kolektif artinya negara-negara tersebut menerima azas pengakuan kolektif terhadap nilai (bidang) sekuriti yang dipertaruhkan. Azas ini bukan berarti penyerahan pengawasan dari sesuatu aspek kebijakan sekuriti, tetapi menunjukkan

¹Lihat J.S. Nye, "Collective economic security", International Affairs, (Oct. 1974), h. 585.

adanya perhatian regional (kolektif) terhadap kebijakan sekuriti nasional serta kesediaan negara-negara anggota untuk menerima dan mengakui nilai yang dipertaruhkan oleh sesuatu kebijakan sekuriti sebagai bahan yang wajar dari penelitian, pembahasan dan keprihatinan bersama ataupun ditanggulangi secara bersama-sama. Dan semua ini sangat dimungkinkan bila memang ada ketekadan politik.

Bila sekuriti kolektif, sesedikitnya di bidang ekonomi (sekuriti kolektif ekonomi), yang dibutuhkan oleh rakyat negara-negara ASEAN tidak dapat dipenuhi, ataupun perspektif ke arah sana tetap kabur, maka lambat laun tetapi pasti mereka menganggap tidak perlu adanya lembaga kolektif (ASEAN). Bahkan dapat diperhitungkan bahwa frustrasi akan timbul di kalangan mereka, yang dapat menyebar luas ke luar batas-batas nasional masing-masing dan akhirnya menjadi alasan (preteks) untuk datangnya campur tangan dari pihak "big powers" yang tetap mengincar kawasan di mana kita hidup.

(iii) Pertimbangan prospektif

Pertimbangan berikut ini disebut "prospektif" berhubungan ia merupakan pertimbangan yang mengantisipasi perkembangan di masa mendatang khususnya perkembangan perdagangan dan bisnis internasional di kawasan Pasifik. Karena yang diperhitungkan dalam pertimbangan ini adalah tendensi dan kejadian-kejadian yang ditaksir akan terjadi di masa depan, yaitu faktor-faktor yang lazimnya menjadi perhatian sesuatu pikiran strategi, maka pertimbangan prospektif ini sampai tingkat tertentu dapat pula diperlakukan sebagai pertimbangan "strategis". Dengan usaha antisipasi ini berarti kita sebagai "bangsa" tidak mengelakkan diri dari "fakta" yang terjadi di masa depan, tetapi menolak "fatalitas" yang diakibatkan oleh fakta itu, bahkan berusaha menarik manfaat yang sebesar mungkin dari realisasi fakta yang kecenderungannya sudah mulai kelihatan dari semenjak sekarang.

Satu kecenderungan yang semakin kelihatan menonjol di dalam perkembangan ekonomi internasional adalah gerakan perdagangan dari Atlantik ke arah Pasifik dengan cara yang sama seperti pergeseran yang dahulu pernah terjadi dari daerah Lautan Tengah ke arah Atlantik.. Kita telah terbiasa dengan anggapan bahwa volume perdagangan dunia untuk sebagian terbesar terjadi di antara negara-negara bangsa (nation-states) yang terdapat di sekitar Atlantik Utara. Namun bila kita perhatikan dengan teliti beberapa perkembangan di tahun-tahun terakhir ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam dasawarsa yang akan datang semakin menonjol perkembangan suatu daerah baru perdagangan dan investasi yang realitas bisnis dan ekonominya pada gilirannya mungkin menjadi dasar realisasi kemungkinan-kemungkinan politik bahkan kemungkinan-kemungkinan militer.

Bila keamanan relatif terdapat di belahan Pasifik, pada tahun 1980 setiap negara penting di situ mungkin sekali mengarahkan lebih separuh dari perdagangannya dan membuat (ataupun menerima) lebih separuh dari investasinya di negeri-negeri yang terdapat di daerah yang sama. Komponen-komponen pokok dari "Masyarakat Perdagangan Daerah Pasifik" (MAPERDAP) ini adalah: Jepang, bangsa-bangsa yang berkebudayaan Sinik di pinggiran Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Muangthai, Vietnam), Indonesia, Filipina, Australia, Selandia Baru, Brasilia, Kolumbia, Venezuela, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada dan barangkali Argentina dan Chili.

Kejadian-kejadian pokok yang dalam dirinya merupakan kekuatan pendorong ke arah perkembangan MAPERDAP di tahun 70-an ini adalah:

- (a) Pertumbuhan ekonomi Jepang yang jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan perdagangan internasionalnya dengan ritme yang sesedikitnya sama dengan ritme rata-rata perdagangan dunia.

- (b) Perkembangan yang kontinu dan cepat di daerah kebudayaan Sinik dan bagiannya yang semakin lama semakin besar di dalam volume perdagangan dunia.
- (c) Keperluan yang semakin besar di pihak negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Jepang untuk mengalihkan operasi manufacturing mereka ke daerah-daerah di mana terdapat biaya buruh yang rendah, seperti daerah kebudayaan Sinik di Asia dan mungkin sekali dengan ritme yang semakin meningkat di dasawarsa mendatang ke Malaysia, Filipina dan Indonesia.
- (d) Pergeseran orientasi dari Australia dan Selandia Baru dari Eropa ke arah Jepang, Pasifik dan Amerika Serikat. Kecenderungan ini untuk sebagian disebabkan masuknya Inggris ke Masyarakat Ekonomi Eropa dan sebagian lainnya karena tersedianya modal dan pasaran Jepang yang semakin besar dan sebagian lagi mungkin didorong kesadaran geografis yang semakin besar mengenai letak dan posisi negara-negara mereka.
- (e) Kepentingan investasi dan pemasaran Jepang yang semakin hari semakin besar di Amerika Latin, terutama di Brasilia, yaitu satu-satunya negara luas di samping Amerika Serikat di mana terdapat imigran Jepang dalam jumlah yang semakin besar. Pada akhir tahun 60-an saja sudah ditaksir terdapat sejumlah 750.000 warga negara Brasilia keturunan Jepang dan pada umumnya mereka ini, lain halnya dengan yang bermukim di Amerika Serikat, tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan Jepang, misalnya di bidang pendidikan anak-anak mereka.
- (f) Pertumbuhan yang pesat dari ekonomi dan teknologi Kanada, hasratnya yang semakin besar untuk membedakan diri dari ekonomi Amerika Serikat dan perhatian yang semakin besar ke arah kawasan Pasifik serta aktif bermain tidak hanya di bidang politik, mungkin sekali antara lain mengisi kekosongan peranan "British" yang ditinggalkan oleh Inggris.

Perkembangan perdagangan dan bisnis internasional di belahan Asia-Pasifik di masa depan perlu mendapat perhatian Indonesia berhubung terdapatnya di situ pengelompokan-pengelompokan negara yang pasti turut sekali menentukan pola-pola alokasi aktivitas ekonomi dan yang pada gilirannya akan mempengaruhi struktur politik regional. Dengan jatuhnya "domino" terakhir di Indocina, yaitu perubahan Laos dari kerajaan menjadi republik komunis, terdapatlah di situ, pertama, satu pengelompokan de facto berdasarkan ideologi komunis di bawah pimpinan Vietnam Utara. Kedua, pengelompokan formil dari lima negara non-komunis, di mana Indonesia termasuk, yaitu ASEAN. Ketiga, pengelompokan faktuil dari dua negara relatif termaju di belahan Selatan Pasifik, yaitu Australia dan Selandia Baru sebagai inti dengan negara-negara Oceania liannya yang bertebaran di lautan Pasifik sebagai satelit-satelit di dalam sistem perbintangan di angkasa luar. Akhirnya, satu pengelompokan tekniko-ekonomis, tidak formil, tetapi tumbuh secara wajar dan spontan, berdasarkan peningkatan hubungan perdagangan yang dimungkinkan oleh tingkat sivilisasi teknik yang banyak sedikitnya paralel, yaitu antara Jepang dengan berbagai negeri yang berkebudayaan Sinik, seperti Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong sebagai inti dan mungkin sekali Muangthai, Singapura serta berbagai negara Amerika Latin sebagai satelit.

Kelompok yang terakhir disebut ini mungkin sekali menjadi kelompok dominan, berhubung pengalaman dalam pertumbuhan perdagangan internasional di Atlantik jelas membuktikan bahwa perdagangan antar-bangsa berkembang, baik dalam volume maupun dalam nilai, untuk sebagian terbesar di antara bangsa-bangsa yang berekonomi paralel, yaitu yang sivilisasi tekniknya banyak sedikitnya setaraf dan yang sistem ekonomi dan industrinya saling mendekati (convergent). Dominasi faktuil kelompok ini mungkin sekali diperkokoh dengan turut aktifnya dua ekonomi paralel dari Amerika Utara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Di samping dorongan yang wajar dari pihak perkembangan teknologi-ekonomi itu, partisipasi yang besar dari Amerika Serikat di dalam aktivitas ekonomi kelompok ini juga berdasarkan motif sekuriti nasionalnya.

Kelihatannya di Amerika Serikat semakin menang tesis, seperti yang banyak sedikitnya tercermin dalam doktrin Ford, yang mengatakan bahwa kejadian (baca: ancaman) terhadap bagian Timur Laut Asia (Jepang, Korea Selatan, Taiwan sampai tingkat tertentu) akan lebih berarti bagi kepentingan sekuriti Amerika daripada ancaman yang sama terhadap negara-negara Asia Tenggara. Maka itu kekuatan ekonomi kedua negara Timur Laut Asia itu penting sekali bagi Amerika dan kekuatan tersebut dapat sekali dibina melalui peningkatan perdagangan luar negerinya. Dengan begini jelas menonjol betapa eratnya hubungan antara sekuriti dan ekonomi.

Sejauh yang mengenai Amerika Serikat, tambahan lagi, dengan uang nasionalnya (dollar) yang secara de facto diakui sebagai uang transnasional, walaupun tidak internasional, berbatasan sekaligus dengan Atlantik dan Pasifik, kenyataan ini memungkinkan sekali area perdagangan dan investasi belahan Atlantik tumbuh dan bekerja secara simultan dengan area perdagangan dan investasi belahan Pasifik dan memungkinkan anggota-anggota kedua belahan tersebut berbisnis sesedikitnya lima puluh persen satu dengan lainnya. Di pihak lain, MAPERDAP kiranya dapat dibayangkan sebagai "merger" area perdagangan yang pernah didominasi oleh Amerika Serikat (kawasan Atlantik) dengan area perdagangan di mana Jepang mempunyai potensi yang besar untuk mendominirnya (Pasifik). Maka itu akan timbullah di sini suatu sistem interdependensi yang asimetrik. Apabila di antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan terdapat interdependensi yang asimetrik, maka pihak yang paling kurang dependen -- dalam hal ini negara-partner berdagang yang relatif maju ekonominya -- dapat saja memanipulir hubungan yang ada untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, tidak hanya di bidang yang sedang dipertaruhkan, tetapi juga dalam bentuk manfaat sampingan di bidang-bidang lainnya.

Sejauh yang mengenai ASEAN, kiranya menjadi jelas, betapa perlu dan mendesaknya ditingkatkan aktivitas ekonomi di antara negara komponen kelompok ini. Pada waktu ini bagian perdagangan

di antara sesama negara anggota dari setiap negara ASEAN hanya merupakan sebanyak-banyaknya lima persen dari seluruh perdagangan luar negeri masing-masing negara yang bersangkutan. Bila kejadian ini berkembang terus seperti ini tanpa perspektif yang meningkat, kiranya dapat dipastikan bahwa eksistensi ASEAN dari semenjak sekarang menjadi terancam. Betapa tidak. Bila perspektif ke arah peningkatan aktivitas ekonomi ASEAN sangat kabur, kemungkinan besar sekali Singapura akan semakin mengkiblatkan aktivitas ekonominya ke arah Jepang dan daerah Sinik lainnya berhubung secara teknologis ekonomi-industrinya praktis sudah paralel dengan mereka. Muangthai mungkin pula semakin mengintegri ekonominya ke dalam "block Indocina" melalui pengembangan proyek Mekong yang secara teknis-idiil mendapat dukungan dari banyak lembaga internasional, termasuk lembaga-lembaga dalam sistem PBB. Mungkin bagi Muangthai sendiri, walaupun hal tersebut sampai dilakukannya, lebih banyak demi pertimbangan sekuriti daripada ekonomi. Namun bagi Muangthai pertimbangan sekuriti merupakan satu keharusan, lahir dari fakta-baja yang pahit, yaitu di satu pihak ia langsung berbatasan dengan negara-negara komunis dan di lain pihak tidak adanya persepakatan pertahanan kolektif dalam sistem ASEAN. Pilipina mungkin juga akan mengambil sikap yang sama. Bila perspektif bisnis memang tidak pasti dalam rangka ASEAN, baginya terbuka pilihan lain: atau melibatkan diri secara lebih aktif dalam lingkungan bisnis Jepang dan daerah Sinik (termasuk Cina komunis) atau ke ekonomi Amerika (dalam hal ini Hawaii sebagai pusat perkembangan). Maka tinggalah Malaysia dan Indonesia. Bila demikian penduduk di kedua negara ini, lambat tetapi pasti, akan membandingkan efektivitas model pembangunan dan kemakmuran di mana mereka hidup dengan model yang diterapkan di dalam pengelompokan negara lainnya, termasuk model kehidupan politiko-ekonomi di jazirah Indocina. Kalau hal ekstrim seperti ini sampai terjadi, apa yang ke luar terlihat kelak sebagai krisis politik-ketatanegaraan, sebenarnya secara esensiil merupakan satu krisis intelektual, yaitu

perubahan fundamental sebagai akibat ketidak-sanggupan para cendekiawan di kedua negara yang bersangkutan untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan politik internasional bagi sekaligus kepentingan perkembangan regional dan kepentingan kemakmuran nasional sesuai dengan sistem politik yang pada mulanya telah mereka pilih.

PENUTUP

Penciptaan persatuan ekonomi di Asia dalam bentuk tertentu sering didengungkan dan salah satu tujuan ASEAN adalah juga usaha ke arah seperti itu. Sampai sekarang belum ada satupun usaha kongkrit yang dilakukan, untuk sebagian besar karena (selama ini) kebutuhan ekonomi dan politik negara-negara di kawasan ini selalu disubordinasikan kepada tuntutan-tuntutan "balance-of-power" dari negara-negara besar. Untuk sebagian karena kebijakan yang dianggap riil oleh sementara pemimpin negara-negara di situ adalah kebijakan pragmatis berdasarkan sikap "wait and see", jadi ketiadaan pandangan prospektif, walaupun tidak strategis.

Tetapi keadaan sudah berubah, sudah lama berubah. Hasil perang Indocina telah mengubah "equation of powers" dari negara-negara besar. Perubahan itu menjadi semakin jelas dengan jatuhnya "domino" yang terakhir di Indocina, yaitu perubahan Laos menjadi negara komunis. Dengan ini menjadi semakin jelaslah corak pengelompokan yang terdapat di kawasan Asia-Pasifik: pengelompokan berbasis komunis di Indocina dan pengelompokan regional berbasis non komunis dalam bentuk ASEAN, serta pengelompokan informil berdasarkan paralelisasi teknologi antara Jepang, Amerika, dan negara-negara berbudaya Sinik. Rakyat ketiga kelompok itu, bahkan dunia internasional, akan melihat kelompok mana yang paling dapat memajukan kesejahteraan warganya melalui pembangunan nasional dan integrasi regional yang sekaligus mengabdikan kepentingan nasional dan kepentingan regional. Keadaan terdorong akan terus berubah dengan kecenderungan pergeseran perdagangan internasional dari belahan Atlantik ke arah belahan Pasifik.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

(Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia)

MUKADDIMAH

Pihak-pihak Agung yang Berjanji:

SADAR akan adanya ikatan sejarah, geografi dan kebudayaan yang saling mengikat rakyat mereka;

BERKEINGINAN untuk membina perdamaian dan stabilitas wilayah dengan menghormati dan patuh kepada keadilan serta tertib hukum dengan meningkatkan ketahanan regional dalam hubungan antara mereka;

BERKEHENDAK untuk memperkokoh perdamaian, persahabatan dan kerjasama mengenai hal-hal yang menyangkut Asia Tenggara sesuai dengan jiwa dan azas-azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dasa Sila yang ditetapkan oleh Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 25 April 1955. Deklarasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang ditanda-tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Deklarasi yang ditanda-tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Nopember 1971;

BERKEYAKINAN bahwa penyelesaian perselisihan atau persengketaan antara negara mereka seharusnya diatur oleh tata-cara yang wajar, berdaya-guna dan cukup luwes dengan menghindari sikap-sikap negatif yang dapat membahayakan atau menghambat kerjasama;

YAKIN akan perlunya kerjasama dengan semua bangsa yang cinta damai baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara, dalam usaha meningkatkan perdamaian dunia, kemantapan dan keserasian;

DENGAN KHIDMAT BERSEPAKAT untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN DAN AZAS-AZAS

Pasal 1

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membina perdamaian abadi, persahabatan yang kekal dan kerjasama antara rakyat mereka yang akan memberi sumbangan bagi kekuatan, kesetia-kawanan dan hubungan akrab mereka.

Pasal 2

Dalam hubungan mereka satu dengan yang lain, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berpedoman pada azas-azas dasar sebagai berikut:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional dari semua bangsa;
- b. Hak setiap Negara untuk melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar;
- c. Tidak campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain;
- d. Penyelesaian perselisihan atau persengketaan dengan cara-cara damai;
- e. Penolakan pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan;
- f. Kerjasama yang efektif antara mereka.

BAB II

PERSAHABATAN

Pasal 3

Dalam usaha mencapai tujuan Perjanjian ini Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berikhtiar untuk mengembangkan dan memperkuat ikatan persahabatan berdasarkan tradisi, kebudayaan dan sejarah, hubungan berte-tangga baik dan kerjasama yang saling mengikat dan dengan iktikad baik akan memenuhi segala kewajiban yang termaktub dalam Perjanjian ini. Untuk membina saling pengertian yang lebih mendalam antara mereka, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan mendorong dan memperlancar hubungan dan pergaulan antara rakyat mereka.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 4

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan meningkatkan kerjasama aktif dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi serta juga dalam hal-hal yang menyangkut cita-cita dan aspirasi bersama mengenai perdamaian internasional, stabilitas wilayah dan mengenai hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 5

Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan seperti termaktub dalam Pasal 4, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha sekuat-kuatnya, baik secara multilateral maupun bilateral, atas dasar persamaan, tanpa diskriminasi dan atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 6

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan bekerjasama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini guna memperkuat dasar bagi terwujudnya suatu masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang damai dan makmur. Untuk tujuan ini, mereka akan meningkatkan pemanfaatan yang lebih besar dari usaha pertanian dan industri mereka serta perluasan perdagangan dan perbaikan prasarana ekonomi mereka guna keuntungan bersama rakyat mereka. Dalam hal ini, mereka akan terus mencari segala jalan untuk kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan Negara-negara lain serta dengan organisasi-organisasi internasional dan regional di luar wilayah ini.

Pasal 7

Guna mencapai keadilan sosial dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di wilayah ini, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan menggiatkan kerjasama ekonomi. Untuk maksud ini, mereka akan menentukan strategi-strategi regional yang tepat untuk pembangunan ekonomi dan untuk saling membantu.

Pasal 8

Pihak-pihak Agung Berjanji akan berikhtiar untuk mencapai kerjasama yang seerat-eratnya dalam tingkatan yang seluas-luasnya dan akan berusaha memberi bantuan kepada satu dan lainnya dalam bentuk latihan-latihan dan fasilitas riset dalam bidang sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.

Pasal 9

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memelihara kerjasama di dalam memajukan tujuan-tujuan damai, keserasian dan stabilitas di wilayah ini. Untuk maksud ini, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan mengatur hubungan tetap dan akan mengadakan musyawarah-musyawarah mengenai masalah internasional dan regional dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pandangan, tindakan dan kebijaksanaan mereka.

Pasal 10

Dalam cara atau bentuk apapun, setiap Pihak Agung yang Berjanji tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi, kedaulatan atau keutuhan wilayah dari Pihak Agung yang Berjanji lainnya.

Pasal 11

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memperkuat ketahanan nasional masing-masing baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya ataupun di bidang keamanan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi mereka masing-masing, bebas dari campur tangan dari luar maupun dari kegiatan-kegiatan subversi dalam negeri guna melindungi kepribadian nasional masing-masing.

Pasal 12

Pihak-pihak Agung yang Berjanji dalam usaha mereka untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan wilayah, akan berusaha untuk bekerjasama dalam segala bidang guna meningkatkan ketahanan regional, berdasarkan azas-azas percaya pada diri dan kemampuan sendiri, saling menghormati, kerjasama dan kesetia-kawanan yang akan mewujudkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat bangsa-bangsa yang kuat dan berdaya di Asia Tenggara.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN SECARA DAMAI

Pasal 13

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan bertekad serta beriktikad baik untuk mencegah timbulnya persengketaan-persengketaan. Dalam hal terjadi persengketaan mengenai hal-hal yang menyangkut mereka secara langsung, khususnya persengketaan yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, mereka akan menghindari pengancaman atau penggunaan kekerasan dan senantiasa akan menyelesaikan persengketaan antara mereka tersebut melalui perundingan yang bersahabat.

Pasal 14

Untuk menyelesaikan persengketaan melalui tata cara regional, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan membentuk suatu Dewan Agung sebagai badan penerus yang terdiri dari seorang Wakil pada tingkat Menteri dari setiap Pihak Agung yang Berjanji untuk memberikan perhatian adanya persengketaan atau adanya keadaan yang diperkirakan dapat mengganggu perdamaian dan keserasian wilayah.

Pasal 15

Di dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui perundingan-perundingan secara langsung, Dewan Agung akan memberikan perhatian terhadap persengketaan atau keadaan tersebut dan akan menyarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa cara-cara penyelesaian yang wajar seperti jasa-jasa baik, penengahan, penyelidikan atau perdamaian. Dewan Agung dapat pula menawarkan jasa-jasa baiknya, atau atas persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dapat menjadi suatu Panitia Penengah, Penyelidik atau Pendamai, Apabila dianggap perlu, Dewan Agung akan menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah memburuknya persengketaan atau keadaan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang tersebut terdahulu dalam Bab ini tidak akan berlaku untuk suatu persengketaan, kecuali semua pihak yang bersengketa sepakat memberlakukannya terhadap persengketaan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak akan mencegah Pihak-pihak Agung yang Berjanji lainnya yang

tidak menjadi pihak dalam persengketaan tersebut untuk menawarkan segala bantuan yang mungkin guna menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang Bersengketa seyogyanya menerima baik tawaran-tawaran bantuan tersebut.

Pasal 17

Tidak ada satu halpun dalam Perjanjian ini yang akan mencegah usaha-usaha perlindungan menurut cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak-pihak Agung yang Berjanji yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa perlu didorong untuk mengambil prakarsa guna penyelesaian persengketaan tersebut melalui perundingan yang bersahabat sebelum menempuh cara-cara lain seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 18

Perjanjian ini akan ditandatangani oleh Republik Indonesia, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand. Perjanjian ini akan disyahkan menurut ketentuan perundang-undangan masing-masing negara penandatanganan. Perjanjian ini akan terbuka untuk aksesinya oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.

Pasal 19

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pendepositan Piagam Pengesahan yang kelima pada Pemerintah-pemerintah Negara penandatanganan yang ditunjuk sebagai tempat pendepositan Perjanjian ini beserta Piagam Pengesahan atau Piagam Aksesinya.

Pasal 20

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa resmi Pihak-pihak Agung yang Berjanji, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Juga dibuat suatu naskah terjemahan dalam bahasa Inggris yang disetujui bersama. Setiap perbedaan tafsiran dari naskah tersebut akan diselesaikan melalui perundingan.

UNTUK MENYAKSIKANNYA Pihak-pihak Agung yang Berjanji telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhi meterai masing-masing.

Dibuat di Denpasar pada tanggal duapuluh empat Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam.

LAMPIRAN II

DEKLARASI KERUKUNAN ASEAN (Asean Concord Declaration)

SUATU IKATAN bersama terjalin antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;

Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Republik Pilipina, Perdana Menteri Republik Singapura, Perdana Menteri Kerajaan Thailand;

MENEGASKAN KEMBALI keterikatan mereka pada Deklarasi-Deklarasi Bandung, Bangkok, dan Kuala Lumpur, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

BERUSAHA untuk membina perdamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara-negara anggota;

BERIKHTIAR untuk memantapkan hasil-hasil ASEAN dan memperluas kerjasama ASEAN dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik;

DENGAN INI MENYATAKAN:

Kerjasama ASEAN akan memperlihatkan, antara lain, tujuan dan azas-azas berikut dalam usaha mencapai stabilitas politik:

1. Stabilitas masing-masing negara anggota dan wilayah ASEAN adalah sumbangan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional. Setiap negara anggota berketetapan hati untuk menghilangkan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh subversi terhadap kestabilannya, dengan demikian memperkokoh ketahanan nasional dan ASEAN.

2. Negara-negara anggota, secara sendiri dan bersama-sama, akan mengambil langkah-langkah aktif bagi terciptanya Wilayah Damai, Bebas, dan Netral secepat mungkin.

3. Penghapusan kemelaratan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf adalah perhatian utama negara-negara anggota. Oleh karena itu, mereka akan meningkatkan kerjasama di dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dengan penekanan khusus pada peningkatan keadilan sosial dan perbaikan taraf hidup rakyatnya.

4. Bencana alam dan musibah besar lainnya dapat menghambat laju pembangunan negara-negara anggota. Mereka akan memberikan, dalam batas kemampuan mereka, bantuan untuk meringankan beban negara-negara anggota yang mengalami musibah.

5. Negara-negara anggota akan mengambil langkah-langkah kerjasama dalam program-program pembangunan nasional dan regional mereka dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di wilayah ASEAN sebanyak mungkin untuk memperluas sifat saling memperlengkapi tata ekonomi masing-masing.

6. Negara-negara anggota, dengan semangat solidaritas ASEAN, akan mengandalkan cara-cara damai semata-mata dalam penyelesaian perselisihan intraregional.

7. Negara-negara anggota akan berusaha, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk menciptakan keadaan yang akan mendorong peningkatan kerjasama damai antara bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar hormat-menghormati dan saling menguntungkan.

8. Negara-negara anggota akan mengembangkan kesadaran kepribadian regional dengan sekuat tenaga dan mengerahkan segala daya upaya untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang kuat, dihormati oleh semua pihak, dan menghormati semua bangsa atas dasar hubungan yang saling menguntungkan, dan sesuai dengan azas-azas penentuan nasib sendiri, persamaan kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa-bangsa lain.

DAN DENGAN INI MENERIMA:

Program kegiatan berikut sebagai kerangka kerjasama ASEAN:

A. Politik

1. Pertemuan Kepala-kepala Pemerintahan negara-negara anggota apabila dan bilamana diperlukan.
2. Penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara.
3. Penyelesaian persengketaan intraregional dengan cara-cara damai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
4. Perhatian segera bagi langkah-langkah permulaan ke arah pengakuan dan penghormatan atas Wilayah Damai, Bebas, dan Netral bila-mana mungkin.
5. Penyempurnaan organisasi ASEAN untuk memperkuat kerjasama politik.
6. Penelitian cara-cara mengembangkan kerjasama dalam bidang pelaksanaan peradilan termasuk kemungkinan bagi Perjanjian Ekstradisi ASEAN.
7. Memperkokoh solidaritas politik dengan memajukan keserasian pandangan, mengkoordinasikan posisi dan, bilamana mungkin dan dikehendaki, mengambil langkah-langkah bersama.

B. Ekonomi

1. Kerjasama dalam bidang komoditi utama, khususnya pangan dan enersi.
 - (i) Negara-negara anggota akan saling membantu dengan memberikan prioritas bagi penyediaan kebutuhan masing-masing negara yang dalam keadaan genting, dan memberikan prioritas bagi pembelian barang-barang ekspor dari negara-negara anggota, yang menyangkut komoditi utama, khususnya pangan dan enersi.

- (ii) Negara-negara anggota juga akan meningkatkan kerjasama dalam bidang produksi komoditi utama, khususnya pangan dan enersi, di masing-masing negara anggota di wilayah ini.

2. Kerjasama industri

- (i) Negara-negara anggota akan bekerjasama untuk mendirikan pabrik-pabrik industri ASEAN yang berukuran besar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan regional akan komoditi yang penting.
- (ii) Prioritas akan diberikan kepada proyek-proyek yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat di negara-negara anggota, yang mendorong peningkatan produksi pangan, yang meningkatkan pendapatan devisa atau menghemat devisa dan yang menciptakan lapangan kerja.

3. Kerjasama dalam bidang perdagangan

- (i) Negara-negara anggota akan bekerjasama dalam bidang-bidang perdagangan guna meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan produksi baru serta perdagangan dan untuk memperbaiki struktur perdagangan masing-masing negara dan antara negara-negara ASEAN yang mendorong peningkatan pembangunan dan mengamankan serta meningkatkan pendapatan dan cadangan devisa mereka.
- (ii) Negara-negara anggota akan menuju ke arah terciptanya pengaturan perdagangan preferensiil sebagai tujuan jangka panjang atas suatu dasar yang dipandang tepat pada tiap saat tertentu melalui serangkaian perundingan, yang harus merupakan persetujuan bulat di antara negara-negara anggota.
- (iii) Perluasan perdagangan antara negara-negara anggota akan diperlancar melalui kerjasama dalam bidang komoditi utama, khususnya pangan dan enersi, serta melalui kerjasama dalam proyek-proyek industri ASEAN.

- (iv) Negara-negara anggota akan mempercepat usaha-usaha bersama untuk mempermudah masuknya bahan mentah serta produksi jadi mereka ke pasaran di luar ASEAN, dengan mengusahakan penghapusan semua hambatan perdagangan di pasaran tersebut, dengan mengembangkan penggunaan baru produksi tersebut, dan dengan mengadakan pendekatan serta tindakan bersama dalam menghadapi pengelompokan-pengelompokan regional maupun setiap kekuatan ekonomi secara sendiri-sendiri.
- (v) Usaha-usaha semacam itu juga akan menuju ke arah kerjasama dalam bidang teknologi dan cara-cara produksi guna meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu produksi ekspor, dan juga untuk mengembangkan produksi ekspor baru dengan tujuan menganekaragamkan ekspor.

4. Pendekatan bersama terhadap masalah-masalah komoditi internasional serta masalah-masalah ekonomi dunia lainnya

- (i) Azas kerjasama ASEAN dalam bidang perdagangan akan tercermin pula atas dasar prioritas di dalam pendekatan bersama terhadap masalah-masalah komoditi internasional serta masalah-masalah ekonomi dunia lainnya seperti pembaharuan sistim perdagangan internasional, pembaharuan sistim monevter internasional, dan pemindahan sumber-sumber nyata, di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wadah-wadah multilateral lainnya yang berhubungan dengan itu, dengan tujuan memberikan sumbangan bagi terciptanya Tata Ekonomi Internasional Baru.
- (ii) Negara-negara anggota akan memberikan prioritas pada stabilisasi dan peningkatan pendapatan ekspor dari komoditi yang dihasilkan dan diekspor mereka melalui persetujuan-persetujuan komoditi termasuk rencana cadangan penyangga serta cara-cara lainnya.

5. Tata cara untuk kerjasama ekonomi

Pertemuan-pertemuan tingkat Menteri mengenai masalah-masalah ekonomi akan diadakan secara teratur atau apabila dipandang perlu dengan tujuan:

- (i) Merumuskan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah negara-negara anggota bagi memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN;
- (ii) Meninjau kembali koordinasi dan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek ASEAN yang telah disetujui dalam bidang kerjasama ekonomi;
- (iii) Bertukar pikiran dan berkonsultasi mengenai rencana dan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagai langkah untuk menyaserasikan pembangunan regional; dan
- (iv) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan itu seperti yang telah disetujui oleh pemerintah-pemerintah negara anggota.

C. Sosial

1. Kerjasama dalam bidang pembangunan sosial, dengan penekanan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan penduduk pedesaan, melalui perluasan kesempatan kerja yang produktif dengan imbalan yang wajar.

2. Dukungan bagi ikut sertanya secara aktif semua sektor dan lapisan masyarakat ASEAN, terutama kaum wanita dan pemuda, dalam usaha-usaha pembangunan.

3. Intensifikasi dan perluasan kerjasama yang telah ada dalam menangani masalah perkembangan penduduk di dalam wilayah ASEAN dan bila-mana mungkin, penyusunan strategi baru dalam bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan.

4. Intensifikasi kerjasama antara negara-negara anggota dan juga dengan badan-badan internasional yang berhubungan dengan itu dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan pengedaran obat-obatan secara tidak sah.

D. Kebudayaan dan Penerangan

1. Diperkenalkannya pelajaran mengenai ASEAN, negara-negara anggotanya, dan bahasa-bahasa nasionalnya sebagai bagian kurikulum di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di negara-negara anggota.

2. Bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN untuk memungkinkan mereka memainkan peranan yang aktif dalam memupuk kesadaran kepribadian regional dan persaudaraan.

3. Pengembangan penyelidikan masalah-masalah Asia Tenggara melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga nasional.

E. Keamanan

Melanjutkan kerjasama atas dasar non-ASEAN antara negara-negara anggota dalam masalah-masalah keamanan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan bersama mereka.

F. Penyempurnaan organisasi ASEAN

1. Penandatanganan Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat ASEAN.

2. Peninjauan kembali secara teratur terhadap struktur organisasi ASEAN dengan tujuan untuk memperbaiki daya gunanya.

3. Penyelidikan mengenai hasrat-guna suatu kerangka konstitusionil baru bagi ASEAN.

DIBUAT di Denpasar, Bali, pada tanggal duapuluh empat Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam.

LAMPIRAN III

JOINT PRESS COMMUNIQUE

Meeting of ASEAN Heads of Government,
Bali, 23 - 24 February 1976

1. The President of the Republic of Indonesia, H.E. General SOEHARTO, the Prime Minister of Malaysia, H.E. Datuk HUSSEIN ONN, the President of the Republic of the Philippines, H.E. FERDINAND E. MARCOS, the Prime Minister of the Republic of Singapore, H.E. LEE KUAN YEW, the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, H.E. KUKRIT PRAMOJ, met in Denpasar, Bali on 23 - 24 February 1976.

2. The Meeting was held in the traditional ASEAN spirit of friendship and cordiality.

3. They reviewed the activities of ASEAN since its inception in 1967, and expressed satisfaction with its progress, especially in fostering the spirit of cooperation and solidarity among the member states.

4. They discussed developments affecting the ASEAN region. They reaffirmed the determination of their respective Governments to continue to work for the promotion of peace, stability and progress in South East Asia, thus contributing towards world peace and international harmony. To this end they expressed their readiness to develop fruitful relation and mutually beneficial cooperation with other countries in the region. They expressed the hope that other powers would pursue policies which would contribute to the achievement of peace, stability and progress in South East Asia.

5. The Meeting discussed ways and means of strengthening cooperation among member states. They believed that it was essential for the member states to move to higher levels, of cooperation, especially in the political, economic, social, cultural, scientific and technological fields.

6. On the Zone of Peace, Freedom and Neutrality the Heads of Government expressed their satisfaction with the progress made in the efforts to draw up initially necessary steps to secure the recognition of and respect for the Zone. They directed that these efforts should be continued in order to realise its early establishment.

7. The Heads of Government signed the Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia.

8. They also signed the Declaration of ASEAN Concord.

9. In pursuance of their determination to forge closer economic cooperation among member states, they agreed that a meeting of Economic Ministers be convened in Kuala Lumpur on 8 - 9 March 1976 to consider measures to be taken towards implementing the decision of the Meeting of ASEAN Heads of Government on matters of economic cooperation.

10. They also agreed that the Meeting of Economic Ministers would discuss particularly the following questions:

i. The mechanisms by which member States shall accord priority in critical circumstances, such as natural disasters, major calamities, and shortages due to artificial or natural causes, to the supply of the individual country's needs in food and energy and priority to the acquisition of exports from member States.

ii. The measures to be taken for intensifying cooperation in the production of basic commodities particularly for food and energy.

iii. The formulation of appropriate measures for initiating co-operative action towards establishing ASEAN largescale industrial projects.

Examples of some of the ASEAN industrial projects that could be considered by the Meeting of ASEAN Economic Ministers are urea, superphosphates, potash, petrochemicals, steel, soda ash, news - print and rubber products.

The Meeting will also give consideration to other projects.

iv. The instruments to be employed in preferential trading arrangements to facilitate the expansion of trade among ASEAN member states in basic commodities, particularly in food and energy and the products of ASEAN industrial projects.

These instruments will include, but not be limited to, the following:

- a. long - term quantity contracts,
- b. purchase finance support at preferential interest rates,
- c. preference in procurement by government entities,
- d. extension of tariff preferences, and
- e. other measures agreed upon.

v. The formulation of joint approaches to international commodity and other economic problems, giving priority to stabilization and increase of export earnings of ASEAN commodities, through commodity agreements, including bufferstock schemes and other means.

11. The Foreign Ministers signed the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. The Heads of Government took note of the nomination of Mr. HARTONO REKSO DHARSONO as Secretary - General of the ASEAN Secretariat..

12. The Heads of Government of Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand were warmly appreciative of the exemplary chairmanship of their Meeting by the President of the Republic of Indonesia and expressed their thanks for the traditional Indonesian hospitality extended to them and the excellent arrangements made for their Meeting.